

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GOWA**

**IRMAYANI NATSIR
105730427213**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GOWA**

**IRMAYANI NATSIR
105730427213**



*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
GOWA
Nama Mahasiswa : IRMAYANI NATSIR
Stambuk/Nim : 105730427213
Jurusan : AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan panitia
penguji skripsi Strata satu (S1) pada hari Sabtu, 7 Oktober 2017 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 8 Oktober 2017

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0916096601

Samsul Rizal, SE., MM
NIDN: 0907028401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE., MM
KTAM: 903078


Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA
NBM: 1073428


HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diperiksa dan diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 1439 H/2017 M. Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji pada hari Sabtu Tanggal 7 Oktober 2017 yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.




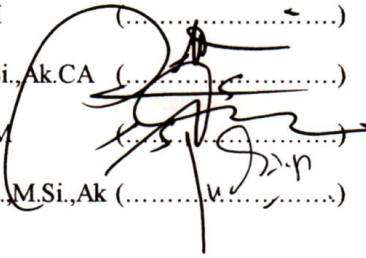
Makassar, 18 Muharram 1439 H
Makassar, 08 Oktober 2017 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 

Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 

Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 

PENGUJI : 1. Drs. H. Sultan Sarda, MM 
2. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.CA 
3. Muh. Nur Rasyid, SE, MM 
4. Linda Arisanty Razak, SE.,M.Si.,Ak 

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan kasih sayang, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, petunjuk dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Muh. Natsir dan Ibunda St. Jumariah tersayang dan kedua Kakanda penulis, Kakanda Isdayyariah Natsir, S.ST dan Kakanda Isnaeni Natsir S.Psi., serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungannya, do’a dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan do’a restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya.
2. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. H. Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Samsul Rizal, SE., MM selaku Dosen pembimbing II yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran di tengah kesibukan untuk memberikan arahan, petunjuk, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak wawasan keilmuan bagi penulis.
7. Bapak Mahmud, S.Sos, MM selaku Kepala Bidang Akuntansi dan seluruh staf BPKD Gowa yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.
8. Seluruh Teman-teman, Rasna, Harry, Anas, Rahmi, Dian, Ira, Pitto, Nur, Kiki, Nanna, Anni, Lisa, Rospa, Bani, Dewi, Hikmah, Nur, Diana, Terima kasih atas tempat, pikiran, dukungan dan motivasinya selama ini sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
9. Untuk Hidayat Kadir Lamahu, Terima kasih telah menampung seluruh keluhan penulis saat penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa bersama kita dan meridhoi jalan hidup kita. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 8 Oktober 2017

ABSTRAK

Irmayani Natsir, Ansyarif Khalid, dan Samsul Rizal. 2017. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa*.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIMDA keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa, serta mengetahui faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh BPKD Gowa sehingga mampu menerapkan SIMDA keuangan, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapannya. Responden dalam penelitian sebanyak 4 orang yang terdiri dari pegawai BPKD Gowa yaitu pegawai bagian penatausahaan, pegawai bagian penganggaran, pegawai bagian akuntansi dan pelaporan serta kepala bagian akuntansi dan pelaporan.

Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para responden menggunakan panduan wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas-aktivitas para pegawai BPKD Gowa serta studi dokumentasi atas dokumen-dokumen terkait. Hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai BPKD Gowa sudah memahami makna SIMDA keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya. Faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA keuangan yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan yaitu andal, tepat waktu serta relevan.

Kata kunci: akuntansi, SIMDA Keuangan, penerapan, faktor-faktor, kualitas informasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem Informasi Manajemen	6
B. Manfaat dan Kualitas Informasi	6
1. Manfaat Informasi	6
2. Kualitas Informasi	7
C. Sistem Informasi Manajemen Daerah	8
1. Tujuan dan Manfaat SIMDA	9
2. Klasifikasi SIMDA	10
3. Unsur SIMDA	10
D. Aplikasi SIMDA Keuangan	11
1. Perkembangan SIMDA Keuangan	11

2. Output yang Dihasilkan	12
3. Fungsi Program Aplikasi SIMDA Keuangan	13
4. Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan	14
5. Pembiayaan dan Penerapan SIMDA Keuangan	16
6. Sumber Daya Manusia	17
E. Teori Implementasi Kebijakan	18
F. Nilai-Nilai Pendukung Implementasi Kebijakan	22
G. Penelitian Terdahulu	23
H. Kerangka Pikir	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
B. Jenis Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Metode Analisis Data	32

BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Tempat Penelitian	34
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	35
C. Struktur Organisasi	38
D. <i>Job Description</i>	38
E. Sumber Daya Manusia	49

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. SIMDA Keuangan Kabupaten Gowa	51
B. Hasil Analisis Penerapan SIMDA Keuangan Kabupaten Gowa	51
C. Pembahasan Hasil Analisis Penerapan SIMDA Keuangan Kabupaten Gowa	55
1. Pemahaman Pegawai tentang SIMDA Keuangan	55

2. Faktor-faktor Pendukung yang Dimiliki BPKD	
Gowa dalam Penerapan SIMDA Keuangan	63
a. Komunikasi	63
b. Sumber Daya Manusia	65
c. Disposisi/Sikap	67
d. Struktur Birokrasi	68
3. Kualitas Informasi yang Dihasilkan	
SIMDA Keuangan	69
D. Manfaat Penerapan SIMDA Keuangan	72
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Jumlah dan Komposisi Aparatur Sipil Negara BPKD Kab. Gowa	49
4.2 Data pegawai BPKD Kab. Gowa berdasarkan Golongan/Pangkat, Tingkat Pendidikan, Tingkat Eselon	50
5.1 Analisis Data Pemahaman Pegawai tentang SIMDA Keuangan	52
5.2 Analisis Data Faktor-faktor Pendukung BPKD Gowa	54
5.3 Analisis Data Kualitas Informasi yang Dihasilkan SIMDA Keuangan	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	28
4.1 Struktur Organisasi	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	79
Lampiran 2	Transkrip Wawancara 1	81
Lampiran 3	Transkrip Wawancara 2	84
Lampiran 4	Transkrip Wawancara 3	87
Lampiran 5	Transkrip Wawancara 4	90
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian 1	93
Lampiran 7	Surat Izin Penelitian 2	94
Lampiran 8	Surat Izin Penelitian 3	95
Lampiran 9	Surat Izin Penelitian 4	96
Lampiran 10	Surat Keterangan Penelitian	97
Lampiran 11	Riwayat Hidup Penulis	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagai berikut:

“...Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan...”

Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengelolaan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun. Peningkatan volume kuantitas transaksi tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerahnya.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut.

“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik”

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA Keuangan dirancang oleh

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

P. Siagian (dalam Ridwan, 2009) menyatakan bahwa.

“Pemanfaatan teknologi informasi bukan lagi merupakan kemewahan akan tetapi sudah merupakan keharusan. Efisien, efektifitas, dan produktivitas kerja organisasi atau perusahaan baik pada tingkat individu, kelompok maupun pada tingkat organisasi atau perusahaan sebagai keseluruhan dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi tersebut.”

BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengembal amanat Pembina penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 mengembangkan SIMDA Keuangan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mengembal amanat PP Nomor 56 Tahun 2005 untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah berhasil menerapkan SIMDA Keuangan secara menyeluruh. Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan

menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang penerapan SIMDA Keuangan khususnya tentang pemahaman pegawai, faktor-faktor pendukung penerapan SIMDA Keuangan serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan, maka peneliti mengambil judul sebagai berikut. **“Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Sejauh mana penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan yang akurat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang SIMDA Keuangan, faktor-faktor pendukung serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan.
2. Pemerintah Daerah:
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan SIMDA Keuangan tentang faktor-faktor pendukung dalam penerapannya di lapangan dan langkah-langkah untuk mewujudkan/mencapai faktor-faktor tersebut serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapannya.
 - b. Sebagai referensi mengenai penerapan SIMDA Keuangan.
3. Akademisi, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, informasi dan manajemen. Menurut (Hall, 2007) sistem adalah “kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama”. (Sutanto, 2007) mendefenisikan informasi sebagai “hasil pengelolaan data yang memberikan arti dan manfaat”. Manajemen didefinisikan oleh (Nugroho, 2007) sebagai “suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi”.

Menurut (Mcleod, 2010) “sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama”. Menurut (Danu, 2007) “sistem informasi manajemen adalah penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen”.

B. Manfaat dan Kualitas Informasi

1. Manfaat Informasi

Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada para pengguna. Adapun manfaat dari informasi itu sendiri

menurut (Sutanta, 2003) adalah :

- a. Menambah pengetahuan
Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
- b. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi
Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya.
- c. Mengurangi risiko kegagalan
Adanya informasi dapat mengurangi risiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadi kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.
- d. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan
Informasi akan menghasilkan keputusan yang terarah, sehingga mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.
- e. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh.

2. Kualitas Informasi

Nilai informasi ditentukan oleh banyak hal, di antaranya adalah dengan melihat kualitas informasi yang dihasilkan. Menurut Ahituv dalam

(Jogiyanto, 2007) bahwa mengukur kualitas informasi dapat dilakukan dengan menggunakan lima macam karakteristik, yaitu :

- a. Akurasi (*Accuracy*)
- b. Ketepatan waktu (*Timelines*)
- c. Relevan (*Relevance*)
- d. Agregasi (*Agregacy*)
- e. Pemformatan (*Formatting*)

Swanson dalam (Jogiyanto, 2007) mengukur kualitas informasi dengan pengukuran keunikan (*Uniqueness*), ketepatan (*Conciseness*), kejelasan (*Clarity*) dan keterbacaan (*Read Ability*).

C. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Sampai dengan bulan Januari 2016 Program Aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 425 Pemda dari 542 Pemerintah Daerah yang ada atau sebanyak 78,41% yang terdiri dari 4 jenis program aplikasi yaitu SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji, dan SIMDA Pendapatan dengan sistem *Database* terintegrasi, sehingga *Outputnya* dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan *Monitoring* terhadap kinerja

pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

1. Tujuan dan Manfaat SIMDA

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah :

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima konektivitas jaringan SIMDA;
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *Webcam* bagi unit kerja penerima konektivitas jaringan SIMDA;
- c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
- d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan *E-Government*; dan
- e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan *Good Government*.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA Keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- a. *Database* terpadu, tidak perlu input berulang-ulang yang sama;
- b. Data yang sama akan tercetak dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
- c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:

- 1) *Output* dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
- 2) *Output* dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/kebijakan.

2. Klasifikasi SIMDA

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu:

- a. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
- b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
- c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/lembaga.

3. Unsur SIMDA

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP, 2008), yaitu :

- a. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
- b. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan

pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait;

- c. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik; dan
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, transaksi, dan penyaluran informasi.

D. Aplikasi SIMDA Keuangan

1. Perkembangan SIMDA Keuangan

SIMDA Keuangan mengalami tiga tahapan perubahan, yaitu.

- a. SIMDA Ver. 1.0

Aplikasi SIMDA Ver. 1.0 ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah, dan draft sistem akuntansi pemerintah yang sedang tahap pengembangan saat itu. Sistem ini dipakai sampai

dengan tahun 2004 dan berhasil diaplikasikan pada sembilan pemerintahan daerah.

b. SIMDA Ver. 2.0

Aplikasi SIMDA Ver. 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya akibat adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan yang mendasarinya, yaitu Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, dan PP No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai diaplikasikan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Sistem ini berhasil diimplementasikan di 28 pemerintahan daerah.

c. SIMDA Ver. 2.1

SIMDA Ver. 2.1 sendiri merupakan sistem informasi versi paling update yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai sekarang masih digunakan dengan beberapa penyempurnaan, misalnya dengan adanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Permendagri No. 59

Tahun 2007 mengenai Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006.

2. Output yang Dihasilkan

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan adalah :

a. Penganggaran

- 1) Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 3) RAPBD dan Rancangan Penjabarannya;
- 4) APBD dan Penjabaran APBD beserta Perubahannya; dan
- 5) Surat Penyediaan Dana (SPD);

b. Penatausahaan

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM);
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 4) Surat Tanda Setoran (STS);
- 5) Register; dan
- 6) Surat pengendalian lainnya.

c. Akuntansi dan Pelaporan

- 1) Jurnal;
- 2) Buku besar;
- 3) Buku pembantu;
- 4) Laporan realisasi anggaran;
- 5) Laporan arus kas;

- 6) Neraca; dan
- 7) Perda pertanggungjawaban dan penjabarannya.

Program Aplikasi SIMDA Keuangan didukung dengan :

- 1) Buku manual sistem dan prosedur penganggaran;
- 2) Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan;
- 3) Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan; dan
- 4) Buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA Keuangan.

3. Fungsi Program Aplikasi SIMDA Keuangan

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan adalah :

- a. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
- b. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
- c. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
- d. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
- e. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi *Electronic Data Processing* (EDP) audit.

4. Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan adalah:

- a. Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan;

- b. Berbasis windows;
- c. Validasi Inputan data lebih terjamin;
- d. Terdapat menuotoritas dan unit otoritas;
- e. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi; dan
- f. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran.

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya:

- a. Sesuai Peraturan

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

- b. Kesiambungan *Maintenance*

Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota provinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.

c. *Transfer of Knowledge*

Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan “satu kali untuk selamanya.”

d. Terintegrasi

SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis. Sehingga, setiap transaksi keuangan yang terjadi, dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

5. **Pembiayaan dan Penerapan SIMDA Keuangan**

Biaya yang dikenakan terhadap atas program aplikasi SIMDA ini dapat dikatakan gratis atau tanpa biaya. Jika dibandingkan dengan program aplikasi lainnya, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mencapai ratusan juta hingga milyaran, tergantung pada jumlah komputer pengguna yang ingin dipasang program tersebut. Hal inilah yang membuat SIMDA menjadi pilihan utama berbagai pemerintah

daerah di Indonesia untuk dijadikan sebagai basis sistem informasi keuangannya.

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA, hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses-proses pelatihan yang nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Besaran jumlah dana yang dibutuhkan untuk proses asistensi implementasi ataupun pendidikan dan pelatihan SIMDA ini, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Artinya, setiap pemerintah daerah tidak akan dibebankan biaya yang melampaui kemampuan keuangannya.

6. Sumber Daya Manusia

Dalam proses implementasi SIMDA, dalam kaitannya dengan ketersediaan SDM pendukung program aplikasi tersebut berjalan lancar, diperlukan adanya penyediaan kebutuhan SDM, baik dari pihak BPKP maupun pihak pemerintah daerah sebagai *Counterpart*. BPKP menyediakan satu tim asistensi SIMDA, yang terdiri dari penanggung jawab, pembantu penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim dan beberapa anggota tim (tergantung pada besar kecilnya pemerintah daerah yang ditangani). Sementara pihak pemerintah daerah mengerahkan SDM dengan level yang sama, ditambah tenaga administrator *Database*, asisten administrator dan timnya, serta seluruh pengguna SIMDA (khususnya bendahara) pada level Satker. Khusus untuk administrator *Database* SIMDA, harus memiliki prasyarat antara lain, mahir dalam menggunakan

komputer, program *Database*, memahami pentingnya pengamanan data dan antusiasme tinggi untuk mempelajari sistem informasi teknologi.

Proses transfer *Knowledge* dilakukan dengan metode yang berbeda bagi masing-masing tipe *Counterpart*. Metode tandem atau pendampingan digunakan untuk mendidik dan melatih administrator *Database*. Metode ini adalah suatu cara mengenali secara dalam dari *Business Process* program aplikasi SIMDA Keuangan bagi administrator dengan cara menerima dan melaksanakan instruksi dari personil tim asistensi yang ditunjuk, dan berdiskusi interaktif jika terdapat permasalahan, khususnya *Troubleshooting*. Metode Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SIMDA Keuangan merupakan metode penyaluran pengetahuan tentang penggunaan SIMDA Keuangan bagi bendahara dan pengguna dari level Satuan Kerja (Satker). Diklat ini dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

E. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” Van Meter dan Van Horn dalam (Agostino, 2006). Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi SIMDA Keuangan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh

George C. Edward III. Menurut Edward dalam (Subarsono, 2005) “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi (*Communications*), Sumber daya (*Resource*), Sikap (*Disposition*) dan struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)”. Keempat variabel tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Sumber informasi yang berbeda dapat melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah sebuah implementasi dapat terlaksana.

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan dari sebuah kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya implementor

tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan akan bingung dengan apa yang akan dilakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal.

2. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan, serta cukup untuk menerapkan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya wewenang yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (Jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna serta tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk melakukan penerapan kebijakan. Untuk itu, perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerjanya. Informasi merupakan sumber daya lainnya yang penting bagi pelaksana kebijakan. Terdapat dua bentuk informasi, yaitu :

- a. Informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, dan

- b. Informasi tentang data pendukung kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Selain SDM dan informasi, sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana kebijakan dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan seperti kantor, dan peralatan.

3. Disposisi atau sikap

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka sebuah kebijakan akan dapat dijalankan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standar Operating Procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *Red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks serta menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

F. Nilai-Nilai Pendukung Implementasi Kebijakan

Penerapan kebijakan harus didukung oleh nilai-nilai dari aparatur pelaksana kebijakan, sehingga penerapan kebijakan dapat berjalan efektif. Nilai-nilai pendukung yang hendaknya dimiliki oleh aparatur Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Gowa sebagai aparatur pelaksana kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Integritas

Integritas dalam hal ini adalah berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

2. Profesionalisme

Profesionalisme berarti bekerja secara tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Tanggung jawab dalam hal ini berkaitan erat dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atau keterangan.

Melalui penerapan nilai akuntabilitas, maka suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi.

3. Sinergi

Sinergi yaitu membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

4. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Adapun indikatornya, antara lain :

- a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan.
- b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

5. Kesempurnaan

Kesempurnaan dalam hal berkaitan dengan senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

G. Penelitian terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, berikut dikemukakan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini:

M. Soleh Pulungan (2014), dalam penelitian yang berjudul “Optimalisasi SIMDA dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas”. Tujuan dari

penelitian ini untuk mengetahui: 1) Implementasi SIMDA terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2) Kesiapan sumber daya manusia yang bertugas mengelola keuangan daerah serta mengetahui permasalahan yang dihadapi; 3) Dukungan dan fungsi Infrastruktur terhadap implementasi SIMDA di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bersifat survei dengan pendekatan penelitian bersifat deskriptif evaluatif. Hasil kajian Implementasi SIMDA di Kutai Kartanegara relatif telah cukup tinggi. Semua produk SIMDA dapat dilakukan di atas rata-rata standar yang diterapkan regulasi. Kesiapan sumber daya manusia terhadap implementasi SIMDA relatif cukup baik. Dukungan jaringan terhadap implementasi SIMDA sudah cukup tinggi. *Software* SIMDA diakui cukup bagus, namun cukup rentan dengan serangan virus.

Niftahusaadah (2010), dalam penelitiannya berjudul “Persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif untuk membandingkan persepsi SKPD terhadap pembuatan LKPD sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan. Pengumpulan data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan 63 Responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *Wilcoxon Signed Rank Test*. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa: (1) persepsi SKPD terhadap pembuatan LKPD sebelum pemanfaatan SIMDA Keuangan adalah “cukup baik”, sedangkan sesudah

pemanfaatan SIMDA Keuangan adalah “sangat baik”, maka dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan persepsi SKPD, (2) dari pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan persepsi SKPD terhadap pembuatan LKPD di Pemerintah Kota Bandung sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan, hal ini menunjukkan efektivitas pemanfaatan SIMDA Keuangan dalam mendukung penyusunan LKPD, dan (3) adanya perbedaan persepsi antara BPK dan SKPD terhadap hasil laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan.

Aulia Lorie Pangestika, Yeni Priatna Sari (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal”. Model analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan fenomenologi dengan mengukur seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu dengan melihat makin besar target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya. Hasil analisis efektivitas sistem informasi manajemen daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Tegal diperoleh bahwa laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA dapat dipahami oleh masyarakat, para wakil rakyat, investor dan pemerintah, dan laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA relevan, andal dan dapat diperbandingkan.

Cipmawati Mohune (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten

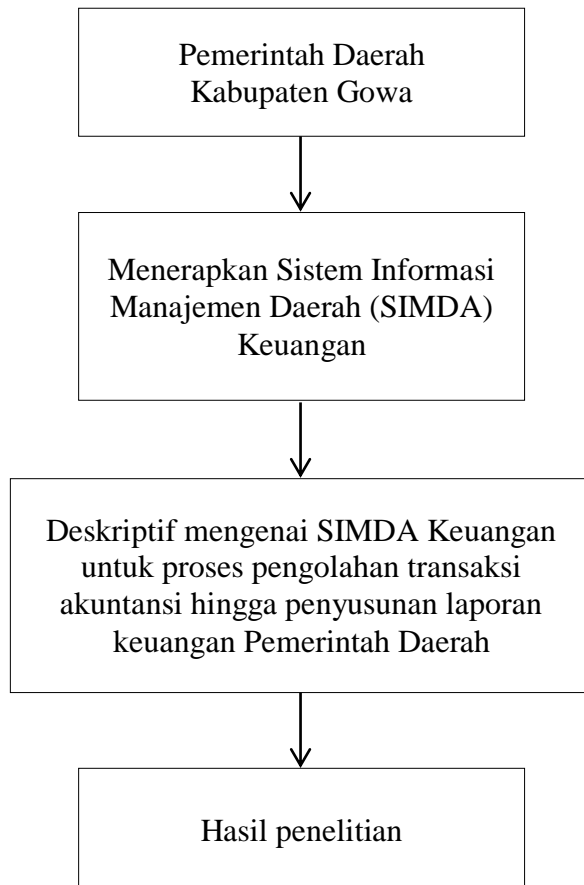
Gorontalo”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 25 kuesioner. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa SIMDA mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan, sebesar 75,3% kualitas laporan keuangan di Kabupaten Gorontalo dipengaruhi oleh penerapan Sistem Informasi manajemen Daerah, sedangkan sisanya sebesar 24,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model, variabel lain tersebut antara lain sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia.

Mohammad Alfian (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Kulon Progo”. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode survei. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kualitas data input dan tingkat pemahaman pengguna mengenai SIMDA berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo; 2) dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA pada SKPD yang ada di Kabupaten Kulon Progo; 3) implementasi SIMDA pada SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H. Kerangka Pikir

Salah satu pemerintah daerah yang telah memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA Keuangan adalah Pemerintah Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah Kabupaten Gowa dengan model kualitatif pendekatan fenomenologi. Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka dilakukan observasi langsung untuk mendapatkan kondisi alamiah di lapangan (*Natural Setting*). Data wawancara dan dokumentasi hasil penelitian dilakukan analisis deskriptif. Analisis terdiri dari organisasi data, pemahaman untuk menemukan tema dan interpretasi dengan dikaitkan pada teori/konsep maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Gowa yang berlokasi di Jalan Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan 12 Juni 2017.

B. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menurut Creswell dalam (Sugiyono, 2014) adalah salah satu jenis pendekatan kualitatif dimana dalam pendekatan jenis ini peneliti melakukan sebuah observasi kepada partisipan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidup partisipan tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengumpulan data oleh peneliti yang kemudian diolah untuk menemukan makna dari apa yang telah dikemukakan oleh partisipan. Fenomenologi pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai perjalanan hidup seseorang. Penelitian ini dilakukan dengan situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara pada BPKD Pemkab Gowa serta dokumentasi/arsip perusahaan berupa gambaran umum, struktur organisasi dan *Job Description*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada informan kunci.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, literature, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Lofland dalam Moleong (2005) mengatakan, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain. Secara garis besar data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:

1. Data yang diperoleh dari interview (wawancara)
2. Data yang diperoleh dari observasi
3. Data yang berupa dokumen, teks, atau karta seni yang kemudian dinarasikan (dikonversikan ke dalam bentuk narasi).

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam, terhadap penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informan kunci (*Key Informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Banyaknya pegawai yang diwawancarai tergantung seberapa layak untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun yang menjadi *Key Informan* dalam penelitian ini adalah penanggungjawab SIMDA Keuangan bagian penatausahaan, penanggungjawab SIMDA Keuangan bagian anggaran, penanggungjawab SIMDA Keuangan bagian akuntansi, dan aktor-aktor lainnya yang memiliki wewenang untuk mengoperasikan SIMDA Keuangan. Pemilihan *Key Informan* yang berperan dalam proses pengoperasian SIMDA Keuangan ini bertujuan mewujudkan validitas informasi yang disampaikan.

2. Observasi

Observasi digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses akuntansi serta kendala-kendala dalam pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu

dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Studi Dokumentasi

Penelusuran data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian sebagai pendukung data penelitian yang tidak diperoleh dalam observasi dan wawancara.

Materi yang diperlukan dalam penelitian penerapan SIMDA Keuangan pada BPKD Gowa adalah:

- a. Data mengenai profil BPKD Gowa mencakup: sejarah, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, *Job Description*, serta gambaran penerapan SIMDA Keuangan pada BPKD Gowa.
- b. Data informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah :

- a. Data dari wawancara, observasi dan dokumentasi diorganisir kesamaan dan perbedaannya sesuai dengan pertanyaan penelitian,
- b. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya,

- c. Mencari keterkaitan antara tema,
- d. Interpretasi atas semua temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan menggunakan teori yang relevan, dan
- e. Hasil interpretasi dituangkan dalam deskriptif analisis kontekstual yang disajikan dalam bab V.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Tempat Penelitian

Badan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Gowa terbentuk pada bulan Januari tahun 2017. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebelumnya merupakan bagian keuangan sekretariat daerah Kabupaten Gowa yang tergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tupoksi di sektor pendapatan dan bagian keuangan sekretariat daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tupoksi di bidang pembelanjaan/pencairan anggaran dan penyusunan anggaran pemerintah daerah kabupaten Gowa.

Latar belakang terbentuknya Badan Pengelolan Keuangan Daerah kabupaten Gowa yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Gowa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Gowa tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupten Gowa.

Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa secara administratif berkedudukan di Sungguminasa yang merupakan ibu kota Kabupaten dan sebagai daerah penyangga kawasan Provinsi Sulawesi

Selatan. Kabupaten Gowa sebagai daerah yang cukup potensial sangat beralasan untuk tetap logis dalam masa Otonomi Daerah, bahwa dapat mandiri, maju seiring dengan Kabupaten/Kota yang maju di Indonesia dan menjadi Kabupaten andalan di Sulawesi Selatan.

Sebagai daerah percontohan otonomi daerah secara logis akan mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga dengan demikian disadari semakin besarnya permasalahan yang akan dihadapi sejalan dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks tentu bukan berimplikasi pada peningkatan jumlah pendanaan yang semakin besar.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah terwujudnya pengelolaan keuangan yang handal dan akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras dengan visi yang telah dirumuskan bersama, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merumuskan dan menetapkan misi

untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
- b. Mewujudkan penyusunan Laporan pertanggungjawaban yang Tepat waktu;
- c. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola barang milik daerah yang baik dan berkelanjutan.

3. Tujuan

Rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, yaitu tercapainya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal dengan tiga sasaran utama :

- a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- b. Meningkatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
- c. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah.

4. Sasaran

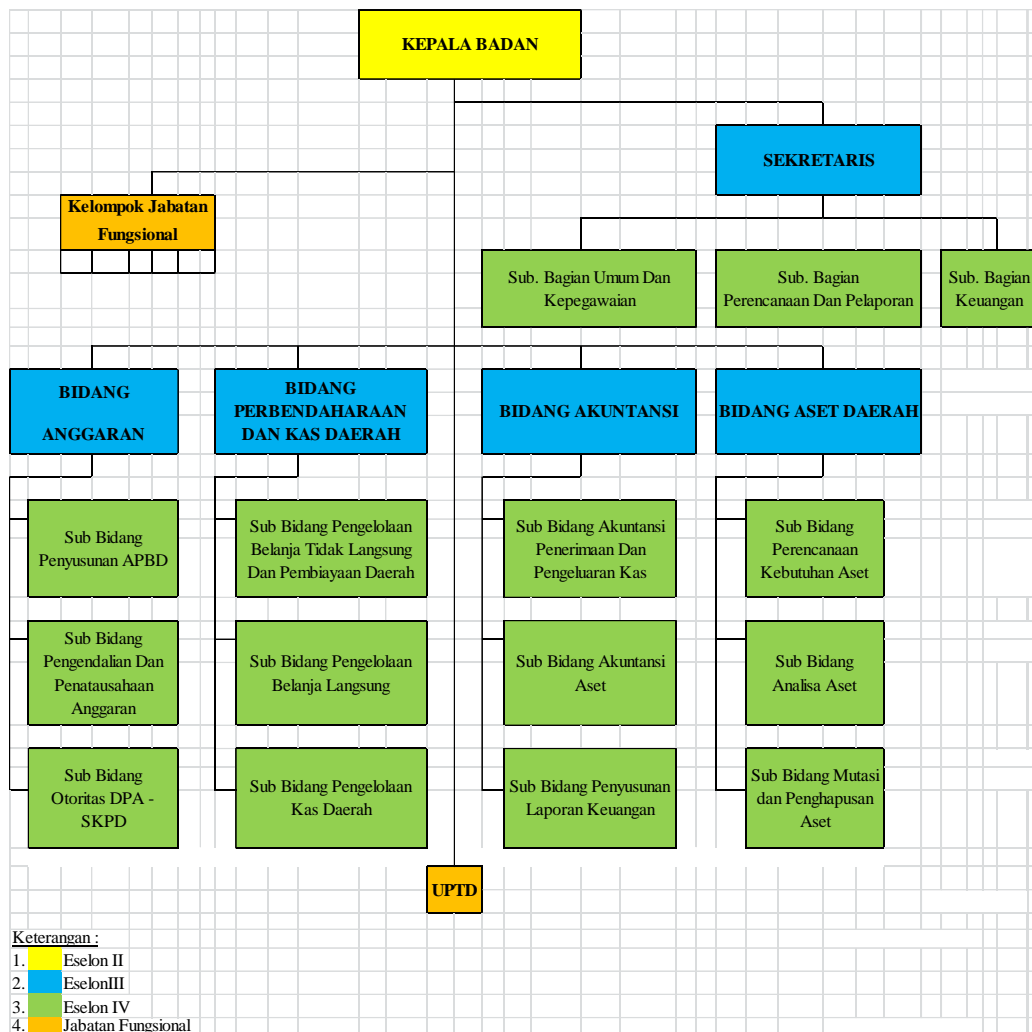
Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain :

- a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase OPD dalam penyusunan rancangan APBD yang tepat waktu
 - b) Persentase OPD dalam pembahasan rancangan Perubahan APBD yang tepat waktu
 - c) Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu
- b. Meningkatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
 - a) Persentase OPD menyusun Laporan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu
 - b) Kualitas Opini Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah
Pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
 - a) Presentase barang daerah yang direvaluasi
 - b) Jumlah aset daerah yang bersertifikat

C. Struktur Organisasi



Sumber: BPKD Kab. Gowa

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPKD Gowa

D. Job Description

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut.

- a. menyusun kebijakan rencana strategik dan program kerja badan sesuai dengan visi misi daerah;
- b. merumuskan dan menyusun program kerja badan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD;
- d. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. mengarahkan dan mengevaluasi program kerja dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. menyelia pelaksanaan tugas sekretariat, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset daerah;
- g. memecahkan masalah serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD;
- h. mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. melaporkan dan memberi saran kepada atasan tentang penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD dan pengelolaan barang milik daerah;
- j. melaksanakan fungsi bendaharawan umum daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- k. melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- l. melaksanakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- n. melaksanakan pembinaan program waskat, mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Badan. Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut.

- a. merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancara tugas;

- c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;
- d. menyelia pelaksanaan tugas Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub. Bagian Keuangan, Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. mengatur urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;
- f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- h. melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga badan;
- i. melaksanakan pengawasan inventarisasi seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak lingkup badan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pemberian petunjuk pemeliharaan keamanan serta ketertiban lingkungan kerja badan;
- k. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip badan;
- l. melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan badan;
- m. melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut.

- a. merencanakan operasional kerja bidang anggaran berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otoritas DPA-SKPD;
- d. menyelia pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan APBD, Sub Bidang Pengendalian dan Penatausahaan Anggaran serta Sub. Bidang Otorisasi DPA-SKPD;
- e. mengatur urusan penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otoritas DPA-SKPD;
- f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otoritas DPA-SKPD;

- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- h. melaksanakan pengkajian kebijakan pengalokasian anggaran daerah;
- i. melaksanakan penyusunan alokasi dan perubahan anggaran daerah dan menyusun standar biaya umum;
- j. melaksanakan penyusunan anggaran kas daerah dan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- k. melaksanakan penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD dan Surat Penyediaan Dana;
- l. melaksanakan pengendalian dan penatausahaan anggaran;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- n. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

mengoordinasikan pelaksanaan perbendaharaan dan kas daerah. Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut.

- a. merencanakan operasional kerja Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan Pengelolaan belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah serta Pengelolaan Kas Daerah;
- d. menyelia pelaksanaan tugas Sub. Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah, Sub. Bidang Pengelolaan Belanja Langsung dan Sub. Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
- e. mengatur urusan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah, Pengelolaan Belanja Langsung dan Pengelolaan Kas Daerah;
- f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah, Pengelolaan Belanja Langsung dan Pengelolaan Kas Daerah;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- h. melaksanakan pengkajian kebijakan penatausahaan anggaran daerah;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengeluaran Kas Daerah (cash out flow);

- j. melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- k. melaksanakan rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan;
- l. melaksanakan pengendalian penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perbendaharaan dan kasdaerah;
- n. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan pelaporan aset daerah. Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut.

- a. merencanakan operasional kerja Bidang Aset Daerah berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan Perencanaan Kebutuhan Aset, Analisa Aset serta Mutasi dan Penghapusan Aset;

- d. menyelia pelaksanaan tugas Subid. Perencanaan Kebutuhan Aset, Sub. Bidang Analisa Aset dan Sub. Bidang Mutasi dan Sub. Bidang Penghapusan Aset;
- e. mengatur urusan Perencanaan Kebutuhan Aset, Analisa Aset dan Mutasi serta Penghapusan Aset;
- f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi Perencanaan Kebutuhan Aset, Analisa Aset serta Mutasi dan Penghapusan Aset;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- h. melakukan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan perumusan dan pengendalian jumlah kebutuhan aset pada masing-masing SKPD dan lembaga terkait dalam rangka perencanaan kebutuhan aset daerah;
- j. melaksanakan rumusan pelaksanaan inventarisasi, pencatatan dan penilaian aset daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi kerja terkait dalam rangka pengelolaan barang milik daerah;
- l. melaksanakan rumusan pelaksanaan pemeriksaan, pemanfaatan, pengamanan, pemusnahan, penghapusan, pengawasan dan Pengendalian barang milik daerah;

- m. melaksanakan perumusan dalam rangka penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Milik Daerah dan Standarisasi Sarana dan Prasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa;
- n. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut.

- a. merencanakan operasional kerja Bidang Akuntansi berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Sub. Bidang Akuntansi Aset dan Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan;

- e. mengatur urusan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan;
- f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi laporan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- h. melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Akuntansi;
- i. melaksanakan pengendalian kegiatan akuntansi manajemen, keuangan, sistem informasi keuangan;
- j. melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan target yang ditentukan;
- k. melaksanakan penyampaian laporan keuangan yang *auditable* secara berkala beserta perinciannya, baik semesteran maupun tahunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan yang memadai dalam rangka pengembangan sistem informasi akuntansi dan keuangan serta bentuk-bentuk pelaporan;
- m. melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan laporan akuntansi manajemen pengelolaan keuangan daerah;
- n. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

E. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa sampai dengan tahun 2017 memiliki pegawai (SDM) sebanyak 58 orang PNS, dan Tenaga Ahli 1 orang, dengan komposisi PNS sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah dan Komposisi Aparatur Sipil Negara BPKD Kab. Gowa

No	SUB UNIT	Jumlah
1	Sekretariat	10 Orang
2	Bidang Anggaran	8 Orang
3	Bidang Perbendaharaan	18 Orang
4	Bidang Akuntansi	13Orang
5	Bidang Aset Daerah	9 Orang
Jumlah		58 Orang

Sumber: BPKD Kab. Gowa

Adapun data pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan jenjang pendidikan, Golongan/pangkat, dan Jabatan/Eselon dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Data pegawai BPKD Kab. Gowa berdasarkan Golongan/Pangkat, Tingkat Pendidikan, Tingkat Eselon

No	Golongan/ Pangkat	Tingkat Pendidikan	Tingkat Eselon				Jumlah
			II	III	IV	JFU	
1	IV	S2	1	-	-	-	1
		S1	-	-	-	-	-
2	III	S2	-	4	2	2	8
		S1	-	1	13	29	43
		D3	-	-	-	-	-
		SLTA	-	-	-	3	3
3	II	D3	-	-	-	-	-
		SLTA	-	-	-	3	3
Jumlah							58

Sumber: BPKD Kab. Gowa

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. SIMDA Keuangan Kabupaten Gowa

Dalam mengelola laporan keuangan, BPKD Gowa sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi SIMDA Keuangan ini karena dapat memudahkan pegawai dalam menyusun laporan keuangannya, staf keuangan yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan tinggal menginput data-data transaksi ke dalam jurnal yang sudah terintegrasi langsung untuk membuat laporan keuangan. Aplikasi tersebut telah mencakup keseluruhan dari proses akuntansi, mulai dari pencatatan yaitu memasukkan/menginput transaksi sesuai dengan tanggal terjadinya kemudian diolah secara otomatis untuk menuju ke proses selanjutnya hingga membentuk sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

B. Hasil Penelitian Penerapan SIMDA Keuangan Kabupaten Gowa

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori dan metodologi penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, informan tersebut adalah para pegawai/staf yang terkait langsung dengan proses akuntansi di BPKD Gowa. Hal ini untuk menjamin

validitas informasi yang disampaikan. Hasil analisis dari data yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Analisis Data Pemahaman Pegawai tentang SIMDA Keuangan

Informasi yang diperoleh	Sumber	Tema yang ditemukan
Sistem yang berbasis komputerisasi untuk mengolah transaksi-transaksi keuangan	Wawancara, Observasi	Pemahaman Makna SIMDA Keuangan
Membantu dalam sisi pelaporan	Wawancara, Observasi	Tujuan dan Manfaat SIMDA Keuangan
Mempermudah proses penyajian RKA, DPA, dan SPD untuk bagian anggaran		
Memperbaiki sistem pengolahan data keuangan pemerintah		
Terdapat 3 laporan yang dihasilkan dari Simda Keuangan untuk bagian anggaran yaitu RKA, DPA, dan SPD	Wawancara, Observasi	Output yang Dihasilkan
Pada bagian penatausahaan laporan yang dihasilkan yaitu SPP, SPM, SP2D, STS, dan surat pengendalian		
Laporan yang dihasilkan dari pengolahan data SIMDA Keuangan pada bagian akuntansi yaitu buku besar, laporan		

perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan neraca.		
RKA merupakan laporan yang memuat tentang rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan		
DPA memuat tentang dasar pelaksanaan anggaran untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan		
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pencairan dana		

Tabel 5.2
Analisis Data Faktor-faktor Pendukung BPKD Gowa

Informasi yang dihasilkan	Sumber	Tema yang ditemukan
Penerapan SIMDA Keuangan dikomunikasikan terlebih dahulu	Wawancara, Observasi	Komunikasi
Sosialisasi tentang penerapan SIMDA Keuangan dilakukan secara bertahap dan kadang-kadang secara tidak langsung		
Dilakukan pelatihan khusus atau diklat SIMDA yang diadakan oleh BPKP	Wawancara, Observasi	Sumber Daya Manusia
Peningkatan SDM melalui diskusi/curah pikir dengan kepala kantor atau sesama pegawai		
Setiap tahun dilakukan sosialisasi untuk menambah pemahaman kepada skpd		
Sangat setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena lebih memudahkan dalam membuat laporan	Wawancara, Observasi	Disposisi/Sikap
Sangat membantu dalam proses transaksi keuangan dan lebih mengefektifkan waktu		
Terdapat pengawan yang baik terhadap SIMDA sehingga kegagalan sistem dapat diminimalisir	Wawancara, Observasi	Struktur Birokrasi

Tabel 5.3
Analisis Data Kualitas Informasi yang Dihasilkan SIMDA Keuangan

Informasi yang dihasilkan	Sumber	Tema yang ditemukan
Informasi yang dihasilkan dapat diandalkan	Wawancara, Observasi	Andal
Penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu sesuai deadline yang telah ditentukan	Wawancara, Observasi	Ketepatan Waktu
Setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing secara otomatis oleh sistem	Wawancara, Observasi	Relevan
Setiap menu aplikasi yang terdapat dalam SIMDA Keuangan saling berhubungan		

C. Pembahasan Hasil Penelitian Penerapan SIMDA Keuangan Kabupaten Gowa

1. Pemahaman Pegawai tentang SIMDA Keuangan

Ciri utama SIMDA Keuangan adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. Secara umum, pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian SIMDA Keuangan pada BPKD Gowa telah mengerti/paham tentang makna dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan. Hal ini terbukti dari wawancara dengan beberapa staf di BPKD Gowa, diantaranya dengan Ibu Hasnawati salah seorang staf

penatausahaan yang bertugas dalam pengoperasian SIMDA Keuangan yang mengatakan “yang jelas SIMDA itu sebuah aplikasi komputer untuk mengelolah transaksi-transaksi keuangan daerah”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Abbas Mallawa seorang staf bagian anggaran yang mengatakan bahwa, “SIMDA itu adalah sebuah sistem yang bekerja secara terintegritas yang dirancang oleh BPKP untuk mengolah data keuangan pemerintah daerah”. Dalam wawancara dengan Ibu Andi Fadillah salah seorang staf bagian akuntansi, staf tersebut mengungkapkan bahwa:

“sebenarnya penerapanta tidak dipaksakan, ini hanya salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk diterapkan pada semua SKPD atau instansi pemerintah di pemkab ini”

Selanjutnya staf tersebut juga mengungkapkan bahwa:

“diawal penerapan SIMDA sudah dilakukan sosialisasi dan mentornya langsung diambil dari BPKP. Selama kita pakai SIMDA, kita tidak pernah lepas dari BPKP dari sisi sosialisasi, penambahan pemahaman kepada SKPD termasuk pendampingan terhadap SKPD maupun pemda”

Pendapat beberapa pegawai tersebut di atas telah sesuai dengan pengertian SIMDA Keuangan secara umum menurut (BPKP, 2007) yaitu sebuah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut George C. Edward dalam subarsono “sebuah implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, konsistensi atau keseragaman dari ukuran-

ukuran dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Berikut ini hasil wawancara mengenai pemahaman pegawai tentang tujuan dari penerapan SIMDA keuangan pada BPKD Gowa.

Bapak Abbas Mallawa, salah seorang staf bagian anggaran mengungkapkan bahwa:

“sebelum menerapkan sebuah kebijakan, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu manfaat dan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Demikian halnya dengan penerapan SIMDA ini, singkatnya salah satu tujuan dari penerapan sistem ini yaitu untuk memperbaiki sistem pengolahan data keuangan pemerintah dengan mengadakan transformasi dari sistem manual ke komputerisasi”

Ibu Hasnawati, salah seorang bagian penatausahaan juga mengungkapkan bahwa:

“tujuan diterapkannya SIMDA keuangan ini untuk membantu pengolahan data keuangan, mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Proses penyajian laporan keuangan menjadi lebih mudah dengan adanya sistem ini”

Hal yang senada juga diungkapkan oleh salah seorang pegawai bagian anggaran yang juga memiliki wewenang untuk mengoperasikan SIMDA keuangan. Dalam wawancara dengan staf tersebut, beliau mengungkapkan, “yang saya pahami dan sesuai dengan yang saya kerjakan, SIMDA Keuangan itu mempermudah proses penyajian RKA, DPA, dan SPD, data tinggal diinput dan otomatis akan terolah sendiri”.

Ketika ditanyakan kepada Ibu Andi Fadillah, pegawai bagian akuntansi yang bertugas untuk membuat laporan keuangan BPKD Gowa, pendapat yang serupa pun dilontarkan. Dalam wawancaranya beliau

mengungkapkan, “selain mempercepat penyajian laporan keuangan, simda keuangan mempermudah ekspor import data antar SKPD, tinggal colok flashdisk data langsung terkirim secara otomatis”.

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pegawai BPKD Gowa telah mengetahui secara umum tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan. Menurut (BPKP, 2007) program aplikasi SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi.

Setiap pegawai yang memiliki kewajiban dalam pembuatan laporan keuangan merasakan manfaat yang sama dari penerapan SIMDA keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Gowa. Manfaat penerapan SIMDA ini tergambar dari hasil wawancara kepada beberapa pegawai BPKD Gowa yang menunjukkan bahwa SIMDA keuangan mempermudah dalam proses pengolahan data keuangan, dimana pegawai hanya bertugas untuk menginput data dan kemudian akan terproses secara otomatis. Hal ini membuat proses pelaporan keuangan menjadi lebih mudah serta dapat mengefektifkan waktu penyusunan laporan keuangan.

Selain pemahaman pegawai mengenai manfaat dan tujuan dari penerapannya, untuk menambah gambaran pemahaman pegawai mengenai SIMDA keuangan, pegawai juga perlu memahami setiap input yang akan diolah atau diproses dengan menggunakan SIMDA keuangan serta output yang akan dihasilkan dari proses pengolahannya. Adapun

output yang dimaksud dari proses pengolahan data pada SIMDA Keuangan merupakan elemen-elemen laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diatur dalam permendagri 13 tahun 2006.

Bapak Abbas Mallawa, salah seorang staf bagian penganggaran mengungkapkan bahwa :

“yah sebenarnya begini dek, disini kan ada 3 macam laporan yang kita buat, ada RKA, DPA, dan SPD. Nah peran SIMDA di sini yah untuk membantu kita dalam pembuatan laporan itu tadi. Kita tidak perlu lagi dong mencatat-catat, kita hanya tinggal perlu input datanya masing-masing ke komputer, nah SIMDA itu yang akan bekerja secara otomatis. Tinggal print, jadi kan lebih gampang”

Ibu Hasnawati, salah seorang staf penatausahaan juga mengungkapkan bahwa:

“kalau di bagian ini output yang dihasilkan itu ada 5 macam, tapi itukan kita perlu input satu per satu ke komputer, nah setelah kita input, hasil inputan tadi itu tinggal kita print dari komputer tadi, hasil print itu yang kita sebut output, outputnya itu sendiri terdiri dari 5 macam laporan yaitu SPP, SPM, SP2D, STS dan surat pengendalian”

Pada bagian akuntansi dan pelaporan, Ibu Andi Fadillah yang merupakan salah seorang staf yang memiliki wewenang mengoperasikan SIMDA keuangan mengungkapkan beberapa output yang dihasilkan oleh SIMDA keuangan. berikut hasil wawancaranya:

“yah seperti biasa lah dek kalau dibagian akuntansi, mulai dari jurnal sampai laporan keuangan. semua itu diolah dengan menggunakan media komputerisasi, itulah yang disebut SIMDA Keuangan, sama seperti dibagian lain, kami hanya bertugas menginput data ke dalam sistem dan mengawasi proses pengolahannya sampai menghasilkan laporan yang kita inginkan”

Wawancara tersebut memperjelas bahwa setiap pegawai telah memahami makna SIMDA Keuangan secara umum yang diperlukan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Pemahaman tersebut terlihat dari pengetahuan pegawai tentang pengertian, manfaat dan tujuan serta output yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan sistem tersebut.

Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan SIMDA keuangan dibutuhkan pemahaman pegawai yang lebih mendalam. Penjelasan mengenai gambaran pelaksanaan SIMDA keuangan hanya dapat penulis jelaskan sebatas mengenai input dan outputnya saja, mengingat SIMDA Keuangan merupakan sebuah aplikasi komputer yang memiliki komponen-komponen yang bekerja secara otomatis, dimana proses otomatisasi tersebut hanya dapat dijelaskan oleh tenaga yang ahli dibidangnya.

Berikut ini hasil wawancara untuk menggambarkan proses pelaksanaan kerja SIMDA keuangan terkait mengenai proses penginputan data sampai dengan menghasilkan sebuah output adalah sebagai berikut :

Bapak Abbas Mallawa, salah seorang staf bagian anggaran mengungkapkan bahwa:

“yah RKA merupakan laporan yang memuat tentang rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibuat sebagai dasar pembuatan DPA setelah disetujui oleh DPR. RKA tadi merupakan input yang menjadi dasar pembuatan DPA”

Selanjutnya staf tersebut juga mengungkapkan bahwa:

“kalau RKA tadi berisi tentang rencana anggarannya, nah di DPA ini memuat tentang dasar pelaksanaan anggaran untuk pendapatan, belanja dan pembiayaannya, selanjutnya DPA ini sebagai dasar untuk dibuatkan SPD oleh BUD yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar pembuatan SPP atau surat permintaan pembayaran. Berarti input yang menjadi dasar pembuatan SPD adalah DPA, sedangkan SPD menjadi input pembuatan SPP”

Ibu Hasnawati, salah seorang staf penatausahaan juga mengungkapkan:

“setelah surat permintaan pembayaran atau SPP diajukan oleh bendahara pengeluaran, kemudian diterbitkanlah SPM (output) berdasarkan SPP (input) tadi yang kemudian diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D”

Penjelasan staf tersebut berlanjut pada wawancara berikut ini:

“SP2D (output) atau surat perintah pencairan dana itu adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pencairan dana dan diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM (input) atau surat perintah membayar”

Ibu Andi Fadillah, salah seorang staf bagian akuntansi kemudian menjelaskan bahwa:

“bagian kami tinggal membuat jurnal dan laporan keuangan. Jurnal (input) merupakan dasar pembuatan buku besar (output), sedangkan buku besar merupakan input yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan seperti laporan arus kas, neraca dan laporan lainnya. Input dan output ini diolah secara otomatis oleh sistem, pekerjaan kita dimudahkan karena kita hanya bertugas untuk menginput data yang menjadi dasar pengolahan output yang diinginkan”

Selanjutnya staf tersebut menambahkan bahwa:

“disinilah peran SIMDA Keuangan dek, bahwa SIMDA Keuangan memudahkan dan mempercepat semua proses, kami tinggal menginput data ke dalam program dan kemudian terolah sendiri. Tetapi kamipun tetap harus berhati-hati karena kesalahan seringkali terjadi pada saat proses penginputan data”

Ungkapan hasil wawancara di atas membuktikan bahwa pegawai BPKD Gowa telah memahami proses pelaksanaan SIMDA keuangan yang berkaitan dengan input dan output data yang dihasilkan. Hal tersebut menambah pengetahuan dan pemahaman pegawai mengenai makna dan proses pelaksanaan SIMDA keuangan secara umum.

SIMDA keuangan bekerja secara terintegritas yang terbagi ke dalam 3 bagian yaitu.

- a. bagian anggaran
- b. bagian penatausahaan
- c. akuntansi dan pelaporan

Setiap bagian bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing, bagian anggaran bertanggungjawab untuk menyusun rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksana anggaran (DPA), serta surat penyedia dana (SPD). Bagian penatausahaan bertanggungjawab untuk menyusun surat perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D) serta surat surat lainnya, sedangkan bagian akuntansi bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan.

Laporan-laporan tersebut diproses secara otomatis dengan menggunakan SIMDA keuangan. Setiap pegawai yang bertanggungjawab menyusun laporan hanya bertugas menginput data ke dalam sistem dan secara otomatis akan terolah sendiri sampai menghasilkan output yang

diinginkan. Hal tersebut memudahkan tanggungjawab yang harus dikerjakan oleh para pegawai.

Secara umum pegawai pada BPKD Gowa telah mengetahui makna SIMDA keuangan, terlihat dari pemahaman mereka mengenai pengertian, manfaat dan tujuan serta input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan dari hasil pengolahannya. Hal tersebut tentunya memperkuat pemahaman mereka dalam memanfaatkan penerapan SIMDA keuangan.

2. Faktor-faktor Pendukung yang Dimiliki BPKD Gowa dalam Penerapan SIMDA Keuangan

Penerapan SIMDA Keuangan yang dilakukan oleh Pemkab Gowa khususnya BPKD Gowa tentunya tidak lepas dari prakondisi yang menjadi faktor pendukungnya. Dari hasil penelitian, berbagai faktor pendukung yang dimiliki untuk menerapkan SIMDA Keuangan pada BPKD Gowa adalah sebagai berikut.

a. Komunikasi

Penerapan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan penerapan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, dalam hal ini kebijakan penerapan SIMDA Keuangan. Kejelasan ukuran dan tujuan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan pelaksana.

Komunikasi dalam bentuk sosialisasi pada BPKD Gowa mengenai penerapan SIMDA Keuangan cukup baik. Hal ini dapat

dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Hasnawati, seorang staf bagian penatausahaan berikut ini:

“yah tentu dek, sebelum diterapkan sudah ada komunikasi dari atasan, kalau ada kebijakan baru yang akan diterapkan, termasuk aplikasi terbaru maka akan disosialisasikan terlebih dahulu oleh atasan. Tentang tujuan kebijakan atau manfaat penerapannya”

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Andi Fadillah, seorang staf bagian akuntansi, beliau mengatakan :

“Pasti sudah dikomunikasikan terlebih dahulu, baik dari atasan ke bawahan ataupun antara sesama pegawai. Tidak mungkin kita menerapkan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu”

Wawancara di atas menunjukkan bahwa komunikasi telah aktif dilaksanakan. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari keaktifan para pegawai untuk menggali sumber informasi yang memadai baik melalui diskusi ataupun tukar pikiran. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Bapak Abbas Mallawa seorang staf bagian anggaran. Beliau mengatakan bahwa :

“Sebenarnya dari dulu komunikasi dan sosialisasi tentang penerapan SIMDA Keuangan ini sudah ada, Cuma bertahap dan kadang-kadang secara tidak langsung, yah contohnya lewat diskusi sama kepala kantor dan pegawai yang bertugas pada bagian yang sama atau kadang-kadang juga sering bertukar pikiran tentang penerapan SIMDA Keuangan itu“

Informasi yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam

penerapan kebijakan diantaranya yaitu komunikasi yang cukup kepada para implementor.

Penerapan kebijakan harus diterima oleh semua personil yang bersangkutan dan harus secara jelas serta akurat mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan itu. Jika para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan dilakukan karena adanya ketidakjelasan informasi yang disebabkan kurangnya komunikasi, tentu saja jika dipaksakan maka tetap tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dalam (Subarsono, 2005) dimana komunikasi merupakan faktor penentu keberhasilan penerapan.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, ditemukan bahwa untuk penerapan SIMDA Keuangan yang optimal pada BPKD Gowa didukung oleh adanya komunikasi atau sosialisasi yang aktif baik dari atasan kepada pegawai maupun antar pegawai.

b. Sumber Daya Manusia

Faktor penting lain yang merupakan penentu keberhasilan penerapan suatu kebijakan yaitu upaya pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu berbagai upaya telah ditempuh oleh BPKD Gowa guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan SDM yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan SIMDA Keuangan. Hal ini tersirat dalam wawancara dengan Ibu Hasnawati, seorang staf bagian penatausahaan yang mengatakan:

“salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas SDM di sini khususnya dalam pengoperasian SIMDA Keuangan, dilakukan pelatihan khusus atau diklat SIMDA yang diadakan oleh BPKP”

Selain itu dalam wawancara dengan Bapak Abbas Mallawa, seorang staf bagian anggaran, beliau mengatakan bahwa:

“peningkatan SDM itu tidak hanya bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan, tapi bisa juga melalui curah pikir/diskusi yang lebih khusus tentang pengoperasian sistem ini”

Seorang staf bagian akuntansi, Ibu Andi Fadillah berpendapat bawa keahlian yang dimiliki oleh SDM BPKD Gowa sudah cukup memadai untuk mengoptimalkan penerapan SIMDA Keuangan. Hal ini tersirat dala wawancara dengan beliau yang menyatakan bahwa:

“Saya kira SDM kantor ini sudah memadai untuk penerapan SIMDA ini, buktinya aplikasi ini mampu dikuasai dan digunakan sebagaimana mestinya, apalagi setiap tahun kita adakan sosialisasi dan mentornya langsung dari BPKP untuk menambah pemahaman kepada SKPD”

Hasil wawancara diatas sejalan dengan pendapat Edward III, menurutnya keahlian dari para pelaksana menjadi salah satu komponen penting sumber daya untuk penerapan kebijakan, olehnya itu jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan yaitu meningkatkan kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) akan berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diketahui bahwa ternyata dalam penerapan SIMDA Keuangan pada BPKD Gowa didukung oleh beberapa faktor dalam hal SDM nya, yaitu :

1. Sumber daya manusia yang memang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya,
2. Untuk penerapan SIMDA Keuangan, pegawai dibekali dengan pelatihan rutin, seperti pelatihan SIMDA, diklat dan sebagainya,
3. Adanya kesadaran para pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan curah pikir/diskusi yang lebih khusus tentang penerapan aplikasi SIMDA keuangan antar pegawai serta kordinasi yang baik.

c. Disposisi/Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses penerapan akan mengalami banyak masalah (Edward III : 1980)

Dalam hal disposisi/sikap ini, ditemukan adanya respon yang baik dari para implementor karena mereka sadar bahwa penerapan SIMDA Keuangan akan membawa dampak yang baik sehingga mereka setuju untuk menerapkan SIMDA Keuangan. Hal tersebut terungkap dari wawancara dengan salah seorang staf bagian akuntansi dan pelaporan

yang mengatakan bahwa, “saya sangat setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena lebih memudahkan dalam membuat laporan”

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh seorang Ibu Hasnawati, staf bagian penatausahaan. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Kalau pendapat pribadi saya, saya merespon baguslah penerapan sistem ini, karena sangat membantu kita dalam memproses seluruh transaksi keuangan pemerintah, lebih mengefektifkan waktu, pokoknya sangat membantu lah”

Tentunya penerapan SIMDA Keuangan ini berjalan lebih baik karena didukung oleh peraturan dan pedoman khusus yang memadai. Hal ini dinyatakan oleh staf bagian anggaran BPKD Gowa, “Ya... setuju saja karena memang penerapannya berdasarkan peraturan khusus yaitu permendagri 13 dan pedoman yang mendukung penerapannya”

Wawancara di atas menunjukkan bahwa respon pegawai atas penerapan SIMDA Keuangan di BPKD Gowa cukup baik sehingga penerapannya dapat terlaksana dengan baik dan dilaksanakan dengan senang hati oleh setiap pegawai.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur yang

mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan salah satunya adalah tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana (Edward III : 1980)

Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan sub unit dan proses pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan pada BPKD Gowa sudah cukup baik. Hal tersebut terungkap dalam wawancara dengan Bapak Mahmud, Kepala Bagian akuntansi dan pelaporan. Beliau mengatakan bahwa :

“Di BPKD Gowa terdapat operator SIMDA bertugas untuk mengawasi jalannya penerapan sistem itu. Sejauh ini sistem tidak pernah bermasalah, karena sebelum terjadi kita telah melakukan antisipasi terlebih dahulu, contohnya kita ada server cadangan, jadi jika sistem mengalami masalah, server cadangan dapat digunakan. SKPD lainpun tidak pernah mengeluh dengan laporan-laporan kita. Itulah gunanya tim administrator sebagai pengawas sekaligus pegawai di kantor ini”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengaruh struktur birokrasi khususnya dalam kaitannya dengan pengawasan atas penerapan SIMDA Keuangan dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh SIMDA Keuangan. Dengan adanya pengawasan yang baik dan perhatian khusus oleh tim administrator bentuk kegagalan yang disebabkan oleh sistem dapat diantisipasi, contohnya dengan pengadaan server cadangan. Hal tersebut membuktikan bahwa struktur birokrasi khususnya dalam hal pengawasan juga memegang peranan penting dalam mendukung penerapan SIMDA Keuangan.

3. Kualitas Informasi yang Dihasilkan SIMDA Keuangan

Bagaimanapun idealnya sebuah aransemen kebijakan, jika output yang dihasilkan dari sebuah penerapan tidak sesuai dengan manfaat yang diharapkan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan dapat dianggap gagal. Dari hasil penelitian pada BPKD Gowa, ditemukan berbagai beberapa karakteristik kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan.

Dalam wawancara dengan Bapak Mahmud selaku Kepala Bagian akuntansi dan pelaporan. Beliau mengatakan bahwa.

1. Ketepatan waktu

“setelah diterapkannya SIMDA Keuangan ini, setiap staf yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan menjadi termotivasi atau tidak malas untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, itu karena apa dek? karena mereka merasa terbantu dengan adanya sistem ini, dan penyajian laporan akhirnya tidak pernah terlambat sejak diterapkannya sistem ini, yah sampai sejauh ini juga sistem ini Alhamdulillah tidak pernah mengalami masalah, sehingga penyajian laporan keuangan tidak pernah terlambat, saya kira seperti itu”

2. Andal

“yahhh.. sejauh ini tidak pernah ada keluhan dari SKPD lain tentang sistem ini, ekspor-import data juga lancar-lancar saja, itu kan berarti laporan kita tidak bermasalah”

3. Relevan

“setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing, dan itu sudah terprogram langsung dalam sistem ini, kita hanya menginput data ke dalam sistem, dan sistem yang

mengolahnya. Kalau sistem tidak saling berhubungan, yah berarti sistemnya gagal dong”

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan defenisi kualitas iniformasi dari ketiga karakteristik diatas yang berarti tepat waktu, saling berhungan, dan dapat diandalkan. Ungkapan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tingkat kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan pada BPKD Gowa sudah cukup baik. Tertundanya penyajian laporan keuangan yang diakibatkan oleh kegagalan sistem hampir tidak pernah terjadi, justru pegawai menjadi termotivasi dengan adanya sistem ini karena sangat membantu dalam proses penyajian laporan keuangan. Setiap bagian dalam sistem bekerja saling secara integritas dan saling berhubungan satu sama lain, setiap transaksi dikelompokkan secara otomatis menurut jenisnya masing-masing oleh sistem, sehingga pegawai hanya bertugas untuk menginput data ke dalam sistem. Setiap laporan yang ditansfer ke SKPD lain tidak pernah mengalami keluhan semenjak diterapkannya sistem ini, hal ini membuktikan bahwa sistem ini telah bekerja dengan baik.

D. Manfaat Penerapan SIMDA Keuangan

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA Keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- d. *Database* terpadu, tidak perlu input berulang-ulang yang sama;
- e. Data yang sama akan tercetak dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
- f. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
 - 3) *Output* dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
 - 4) *Output* dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/kebijakan.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian seperti dibahas dalam bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara umum pegawai pada BPKD Gowa telah mengetahui makna SIMDA keuangan, terlihat dari pemahaman mereka mengenai pengertian, manfaat dan tujuan serta input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan dari hasil pengolahannya.
2. Faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh BPKD Gowa dalam penerapan SIMDA Keuangan secara optimal, antara lain:
 - a. Komunikasi atau sosialisasi yang aktif mengenai tujuan penerapan atau manfaat dari penerapan sistem tersebut.
 - b. Sumber Daya Manusia yang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya
 - c. Adanya sikap implementor yang menerima/setuju atas pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan serta dukungan dari kepala kantor/pemimpin.
 - d. Terdapat pengawasan yang baik terhadap SIMDA sehingga bentuk kegagalan yang disebabkan oleh sistem dapat diantisipasi.

3. Kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan sudah cukup baik, antara lain:
 - a. Ketepatan Waktu
 - b. Andal
 - c. Relevan

B. Saran

Saran penulis sebagai hasil dari penelitian ini dalam rangka penerapan SIMDA Keuangan pada organisasi/instansi lain yang tertarik untuk menerapkan SIMDA Keuangan sebagai sistem komputerisasi pengolahan data keuangannya yaitu perlu pengembangan atas pemahaman pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan serta memahami faktor-faktor pendukung apa yang perlu dimiliki oleh setiap instansi untuk dapat menerapkan SIMDA Keuangan baik dalam hal komunikasi, pengembangan sumber daya manusia dan yang paling penting adalah sikap dari para implementor serta komitmen pemimpin dan pengawasan. Hal ini yang turut mendukung penerapan SIMDA Keuangan sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu serta dapat diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Mohammad. 2015. *Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 18 (3). 119-131.
- Creswell. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. (<http://penalaran-unm.org/2016/11/12/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/>). Diakses 31 januari 2017.
- Hall, J.A. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Jogiyanto. 2007. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Mcleod, Raymod. 2010. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mohume, C. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo: Skripsi tidak diterbitkan.
- Niftahusadah. 2010. *Persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pembuatan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum dan sesudah pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung*. Universitas Pendidikan Bandung. Bandung: Skripsi tidak diterbitkan.
- Nugroho, Eko. 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Pangestika, A. L. 2016. *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal*. Tegal.

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2005. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang *Informasi Keuangan Daerah*. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2005. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Pulungan, M. Soleh. 2014. *Optimalisasi SIMDA dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas*. Jurnal Bina Praja. 6 (4). 269-282.

Ridwan. 2009. *Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu*. Bandung. Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.

Satgas Pengembangan SIMDA. 2011. *Bimbingan Teknis SIMDA keuangan*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

Satgas Pengembangan SIMDA. 2008. *SIMDA dan Penerapannya*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.

Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem informasi manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutanto, Azhar. 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Linggar Jaya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia

Van Meter dan Van Horn. 2006. *Teori Implementasi Kebijakan*. (<http://www.materibelajar.id/2016/03/implementasi-kebijakan-publik-definisi.html>). Diakses 28 januari 2017.

Wira Pangestu, Danu. 2007. *Teori Dasar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. (ilmukomputer.org/wp-content/uploads/2008_sim.pdf). Diakses 27 Januari 2017



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa”**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah sejauh mana penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan yang akurat.

Daftar pertanyaan:

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pengertian SIMDA Keuangan?
2. Apa saja tujuan dan manfaat dari SIMDA Keuangan?
3. Apa saja input yang akan diolah dan output yang dihasilkan SIMDA Keuangan?
4. Bagaimana peran SIMDA dalam mengolah input sampai dengan menghasilkan output yang diinginkan?
5. Apakah ada pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu mengenai SIMDA Keuangan sebelum diterapkan?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah SDM yang ada di BPKD Gowa sudah memadai dalam pengoperasian SIMDA? Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di BPKD Gowa?

7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penerapan SIMDA Keuangan?
Apakah Anda setuju dengan adanya kebijakan ini?
8. Apakah selama pengoperasian SIMDA Keuangan pernah bermasalah?
9. Apakah dalam pelaksanaan SIMDA Keuangan, petunjuk pelaksanaan/prosedur operasi kerja dapat mudah dimengerti oleh para pegawai?
10. Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara 1

Tanggal : Senin, 08 Mei 2017

Waktu : 09.00 – 10.00

Narasumber : Staf Bagian Akuntansi dan Pelaporan

1. Peneliti : Menurut Bapak/Ibu apakah pengertian SIMDA Keuangan?

Narasumber : SIMDA Keuangan itu sistem pengelolaan keuangan mulai dari proses penganggaran, penatausahaan sampai pelaporan.

2. Peneliti : Apa saja tujuan dan manfaat dari SIMDA Keuangan?

Narasumber : Selain mempercepat penyajian laporan keuangan, simda keuangan mempermudah ekspor import data antar SKPD, tinggal colok flashdisk data langsung terkirim secara otomatis.

3. Peneliti : Apa saja input yang akan diolah dan output yang dihasilkan SIMDA Keuangan?

Narasumber : Di bagian akuntansi, mulai dari jurnal sampai laporan keuangan. Semua itu diolah dengan menggunakan SIMDA Keuangan, sama seperti di bagian lain, kami hanya bertugas menginput data ke dalam sistem dan mengawasi proses pengolahannya sampai menghasilkan laporan yang kita inginkan.

4. Peneliti : Bagaimana peran SIMDA dalam mengolah input sampai dengan menghasilkan output yang diinginkan?

Narasumber : Jurnal (input) merupakan dasar pembuatan buku besar (output), sedangkan buku besar merupakan input yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan seperti laporan arus kas, neraca dan laporan lainnya. Input dan output ini diolah secara otomatis oleh sistem, pekerjaan kita dimudahkan karena kita hanya bertugas untuk menginput data yang menjadi dasar pengolahan output yang diinginkan.

Peran SIMDA Keuangan memudahkan dan mempercepat semua proses, kami tinggal menginput data ke dalam program dan kemudian terolah sendiri. Tetapi kamipun tetap harus berhati-hati karena kesalahan seringkali terjadi pada saat proses penginputan data.

5. Peneliti : Apakah ada pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu mengenai SIMDA Keuangan sebelum diterapkan?

Narasumber : Pasti sudah dikomunikasikan terlebih dahulu, baik dari atasan ke bawahan ataupun antara sesama pegawai. Tidak mungkin kita menerapkan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu.

6. Peneliti : Menurut Bapak/Ibu apakah SDM yang ada di BPKD Gowa sudah memadai dalam pengoperasian SIMDA?

Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di BPKD Gowa?

Narasumber : Saya kira SDM kantor ini sudah memadai untuk penerapan SIMDA ini, buktinya aplikasi ini mampu dikuasai dan digunakan sebagaimana mestinya, apalagi setiap tahun kita adakan sosialisasi dan mentornya langsung dari BPKP untuk menambah pemahaman kepada SKPD.

7. Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penerapan SIMDA Keuangan? Apakah Anda setuju dengan adanya kebijakan ini?

Narasumber : Saya sangat setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena lebih memudahkan dalam membuat laporan.

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara 2

Tanggal : Senin, 08 Mei 2017

Waktu : 10.30 – 12.00

Narasumber : Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan

1. Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penerapan SIMDA Keuangan? Apakah Anda setuju dengan adanya kebijakan ini?

Narasumber : Mengenai penerapan SIMDA Keuangan di kantor ini, saya sangat setuju karena kami sangat terbantu dengan adanya aplikasi SIMDA. Karena kenapa? Sebelum memakai SIMDA Keuangan, kita memakai Ms. Excel sebagai sarana penyusunan laporan keuangan dan tidak terbayangkan bagaimana susahnya menyusun laporan keuangan dengan memakai Ms. Excel.

2. Peneliti : Apakah selama pengoperasian SIMDA Keuangan pernah bermasalah?

Narasumber : Sejauh ini sistem tidak pernah bermasalah, karena sebelum terjadi kita telah melakukan antisipasi terlebih dahulu, contohnya kita ada server cadangan, jadi jika sistem mengalami masalah, server cadangan dapat digunakan. SKPD lainpun tidak pernah mengeluh dengan

laporan-laporan kita. Itulah gunanya tim administrator sebagai pengawas sekaligus pegawai di kantor ini.

3. Peneliti : Apakah dalam pelaksanaan SIMDA Keuangan, petunjuk pelaksanaan/prosedur operasi kerja dapat mudah dimengerti oleh para pegawai?

Narasumber : Masalah operasi kerja, semua pegawai sudah paham khususnya yang memakai SIMDA. Cuma kadang memang ada persoalan teknis yang butuh untuk didiskusikan.

4. Peneliti : Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan?

Narasumber : a. Ketepatan waktu

Setelah diterapkannya SIMDA Keuangan ini, setiap staf yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan menjadi termotivasi atau tidak malas untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, karena mereka merasa terbantu dengan adanya sistem ini, dan penyajian laporan akhirnya tidak pernah terlambat sejak diterapkannya sistem ini, yah sampai sejauh ini juga sistem ini Alhamdulillah tidak pernah mengalami masalah, sehingga penyajian laporan keuangan tidak pernah terlambat.

b. Andal

Sejauh ini tidak pernah ada keluhan dari SKPD lain tentang sistem ini, ekspor-import data juga lancar-lancar saja, itu kan berarti laporan kita tidak bermasalah.

c. Relevan

Setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing, dan itu sudah terprogram langsung dalam sistem ini, kita hanya menginput data ke dalam sistem, dan sistem yang mengolahnya. Kalau sistem tidak saling berhubungan, berarti sistemnya gagal.

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara 3

Tanggal : Jum'at 12 Mei 2017

Waktu : 09.00 – 10.30

Narasumber : Staf Bagian Anggaran

1. Peneliti : Menurut Bapak/Ibu apakah pengertian SIMDA Keuangan?

Narasumber : SIMDA itu adalah sebuah sistem yang bekerja secara terintegritas yang dirancang oleh BPKP untuk mengolah data keuangan pemerintah daerah.

2. Peneliti : Apa saja tujuan dan manfaat dari SIMDA Keuangan?

Narasumber : Salah satu tujuan dari penerapan sistem ini yaitu untuk memperbaiki sistem pengolahan data keuangan pemerintah dengan mengadakan transformasi dari sistem manual ke komputerisasi.

3. Peneliti : Apa saja input yang akan diolah dan output yang dihasilkan SIMDA Keuangan?

Narasumber : Terdapat 3 laporan yang dihasilkan dari Simda Keuangan untuk bagian anggaran yaitu RKA, DPA, dan SPD.

4. Peneliti : Bagaimana peran SIMDA dalam mengolah input sampai dengan menghasilkan output yang diinginkan?

Narasumber : RKA merupakan laporan yang memuat tentang rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibuat sebagai

dasar pembuatan DPA setelah disetujui oleh DPR. RKA tadi merupakan input yang menjadi dasar pembuatan DPA.

RKA tadi berisi tentang rencana anggarannya, nah di DPA ini memuat tentang dasar pelaksanaan anggaran untuk pendapatan, belanja dan pembiayaannya, selanjutnya DPA ini sebagai dasar untuk dibuatkan SPD oleh BUD yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar pembuatan SPP atau surat permintaan pembayaran. Berarti input yang menjadi dasar pembuatan SPD adalah DPA, sedangkan SPD menjadi input pembuatan SPP.

5. Peneliti : Apakah ada pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu mengenai SIMDA Keuangan sebelum diterapkan?

Narasumber : Sebenarnya dari dulu komunikasi dan sosialisasi tentang penerapan SIMDA Keuangan ini sudah ada, Cuma bertahap dan kadang-kadang secara tidak langsung, contohnya lewat diskusi sama kepala kantor dan pegawai yang bertugas pada bagian yang sama atau kadang-kadang juga sering bertukar pikiran tentang penerapan SIMDA Keuangan itu.

6. Peneliti : Menurut Bapak/Ibu apakah SDM yang ada di BPKD Gowa sudah memadai dalam pengoperasian SIMDA?

Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di BPKD Gowa?

Narasumber : Peningkatan SDM itu tidak hanya bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan, tapi bisa juga melalui curah pikir/diskusi yang lebih khusus tentang pengoperasian sistem ini.

7. Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penerapan SIMDA Keuangan? Apakah Anda setuju dengan adanya kebijakan ini?

Narasumber : Setuju saja karena memang penerapannya berdasarkan peraturan khusus yaitu permendagri 13 dan pedoman yang mendukung penerapannya.

Lampiran 5 : Transkrip Wawancara 4

Tanggal : Senin, 15 Mei 2017

Waktu : 10.00 – 12.00

Narasumber : Staf Bagian Penatausahaan

1. Peneliti : Menurut Bapak/Ibu apakah pengertian SIMDA Keuangan?

Narasumber : SIMDA itu sebuah aplikasi komputer untuk mengelolah transaksi-transaksi keuangan daerah.

2. Peneliti : Apa saja tujuan dan manfaat dari SIMDA Keuangan?

Narasumber : Tujuan diterapkannya SIMDA keuangan ini untuk membantu pengolahan data keuangan, mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Proses penyajian laporan keuangan menjadi lebih mudah dengan adanya sistem ini.

3. Peneliti : Apa saja input yang akan diolah dan output yang dihasilkan SIMDA Keuangan?

Narasumber : Terdiri dari 5 macam laporan yang dihasilkan yaitu SPP, SPM, SP2D, STS dan surat pengendalian.

4. Peneliti : Bagaimana peran SIMDA dalam mengolah input sampai dengan menghasilkan output yang diinginkan?

Narasumber : Surat permintaan pembayaran atau SPP diajukan oleh bendahara pengeluaran, kemudian diterbitkanlah SPM

(output) berdasarkan SPP (input) tadi yang kemudian diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

SP2D (output) atau surat perintah pencairan dana itu adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pencairan dana dan diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM (input) atau surat perintah membayar.

5. Peneliti : Apakah ada pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu mengenai SIMDA Keuangan sebelum diterapkan?

Narasumber : Tentu, sebelum diterapkan sudah ada komunikasi dari atasan, kalau ada kebijakan baru yang akan diterapkan, termasuk aplikasi terbaru maka akan disosialisasikan terlebih dahulu oleh atasan. Tentang tujuan kebijakan atau manfaat penerapannya.


6. Peneliti : Menurut Bapak/Ibu apakah SDM yang ada di BPKD Gowa sudah memadai dalam pengoperasian SIMDA? Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di BPKD Gowa?

Narasumber : Salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas SDM di sini khususnya dalam pengoperasian SIMDA Keuangan, dilakukan pelatihan khusus atau diklat SIMDA yang diadakan oleh BPKP.

7. Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penerapan SIMDA Keuangan? Apakah Anda setuju dengan adanya kebijakan ini?

Narasumber : Kalau pendapat pribadi saya, saya merespon baguslah penerapan sistem ini, karena sangat membantu kita dalam memproses seluruh transaksi keuangan pemerintah, lebih mengefektifkan waktu, pokoknya sangat membantu.

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian 1



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 403/05/C.4-II/V/38/2017 Makassar, 09 Sya'ban 1438H
Lamp. : - 04 Mei 2017M
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

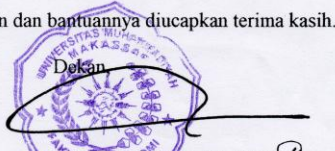
Kepada Yth.
Ketua LP3M Unismuh Makassar
di-
Makassar

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

N a m a : **Irmayani Natsir**
Stambuk : 10573 0427213
Jurusan : Akuntansi
Judul Penelitian : **Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa**
Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.




Dekan
Ismail Rasulong, SE. MM
NBM. 903 078,-

Tembusan :


1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221
Menara Iqra Lantai 7 Kampus Talaslapang Makassar - Sulawesi Selatan

Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian 2



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



Nomor : 729/Izn-5/C.4-VIII/V/37/2017

07 Sya'ban 1438 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

03 May 2017 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala UPT P2T BKPM D Prov. Sul-Sel
 di –
 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 403/05/C.4-II/V/38/2017 tanggal 3 Mei 2017, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **IRMAYANI NATSIR**
 No. Stambuk : **10573 04272 13**
 Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
 Jurusan : **Akuntansi**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

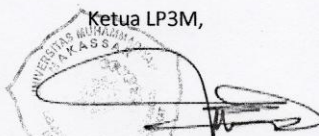
"Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Mei 2017 s/d 5 Juli 2017.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

05-17

Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian 3




1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 6 2 7 0

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 6123/S.01P/P2T/05/2017 KepadaYth.
Lampiran : Bupati Gowa
Perihal : Izin Penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 729/Izn-05/C.4-VIII/V/37/2017 tanggal 03 Mei 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **IRMAYANI NATSIR**
Nomor Pokok : 10573 04272 13
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Mei s/d 08 Juli 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 08 Mei 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu




A. M. YAMIN. SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 09-05-2017

Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian 4



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 12 Mei 2017

K e p a d a

Nomor : 070/ 274/BKB.P/2017
 Lamp : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan
 Daerah Kab. Gowa
 Di-
T e m p a t

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
 Nomor: 6123/S.01.P/P2T/05/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **IRMAYANI NATSIR**
 Tempat/Tanggal Lahir : Gowa, 5 Oktober 1995
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Pramuka Parangrea

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penulisan Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA**"


Selama : 08 Mei 2017 s/d 08 Juli 2017
 Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**
KEPALA BADAN,



DRS. BAHARUDDIN.T
 Pangkat : Pembina Tk. 1
 NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar;
3. Yang bersangkutan;

Lampiran 10 : Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Jl. Mesjid Raya No.30 Sungguminasa Telp/Fax (0411) 865098 Kode Pos 92111

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 870/70 /BPKD/VI/2017

1. Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama : H. Abd. Karim Dania, SE, MM
 b. Nip : 19641231 199603 1 012
 c. Pangkat : Pembina Tk.I
 d. Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : Irmayani Natsir
 b. NIM : 105730427213
 c. Jurusan : Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar
 d. Tempat / tgl lahir : Gowa, 5 Oktober 1995
 e. Jenis Kelamin : Perempuan
 f. Alamat : Jl. Pramuka Parangrea, Kec. Bajeng, Kab. Gowa

2. Telah mengadakan Penelitian/Pengumpulan data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Thesis yang berjudul **"ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA"** mulai pada tanggal 08 Mei 2017 s/d 12 Juni 2017.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungguminasa, 13 Juni 2017



KEPALA BADAN,

H. ABDUL KARIM DANIA, SE, MM
PANGKAT : PEMBINA Tk.I
N.I.P : 19641231 199603 1 012

Tembusan, Yth :

1. Bapak Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Gowa di Sungguminasa;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar;
4. Arsip,-

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Irmayani Natsir, lahir di Gowa, pada tanggal 5 Oktober 1995. Anak ketiga dari pasangan H. Muh. Natsir dan Hj. St. Jumariah. Memiliki dua orang saudara perempuan yakni kakak bernama Isdayyaniah Natsir dan Isnaeni Natsir. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Jenjang pendidikan yang pertama adalah TK. Aisyiah Bontomaero Kec. Bajeng Kab. Gowa, menamatkan sekolah dasar pada tahun 2007 di SDI Maccini Baji Kec. Bajeng Kab. Gowa, selanjutnya menyelesaikan pendidikan di SMP Muhammadiyah Limbung pada tahun 2010, menamatkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Bajeng pada tahun 2013. Selanjutnya, menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi mulai dari tahun 2013. Tidak memiliki riwayat organisasi selama masa perkuliahan.